Studi Komparatif Global tentang REDD+

Lembar fakta tentang temuan dan tujuan penelitian

Deforestasi dan degradasi hutan mencapai sekitar 10% dari emisi gas rumah kaca dunia. Oleh karena itu, mengurangi emisi ini melalui konservasi dan restorasi hutan sangat penting bagi upaya-upaya untuk mengurangi perubahan iklim.

REDD+ (**R**educing **E**missions from **D**eforestation and forest **D**egradation plus enhancing forest carbon stocks/mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta memperkuat cadangan karbon hutan) diperkenalkan sebagai suatu pendekatan baru bagi perlindungan hutan: dikembangkan untuk menciptakan suatu sistem yang memberikan insentif keuangan kepada pengguna hutan untuk melestarikan, memperbaiki dan mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan.

REDD+ telah berkembang jauh sejak diperkenalkan, sebagai tanggapan terhadap bagaimana program ini dipahami dalam konteks yang berbeda dan oleh aktor yang berbeda, ketiadaan kesepakatan internasional yang baru tentang perubahan iklim, serta sejumlah besar tantangan teknis, politis dan ekonomis yang muncul dalam rancangan dan implementasinya.

Banyak negara terlibat dalam REDD+, bahkan saat negosiasi internasional masih berlangsung. Pemerintah mengembangkan strategi nasional REDD+ dan membentuk lembaga untuk mengkoordinasikan kegiatan dan mengelola pendanaan. Pada tingkat subnasional (misalnya di provinsi, kabupaten dan desa), berbagai organisasi menyelenggarakan proyek-proyek percontohan atau uji coba.

Pada 2009, CIFOR dan mitranya meluncurkan Studi Komparatif Global tentang REDD+, yang mengamati kegiatan-kegiatan nasional dan subnasional REDD+ di 13 negara. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tantangan dan kondisi yang memungkinkan untuk mencapai kebijakan REDD+ dan proyek yang hasilnya efektif, efisien dan berkeadilan. Hasilnya dimanfaatkan sebagai pedoman bagi para pembuat kebijakan, pemerintah dan pemrakarsa proyek dalam merancang dan menerapkan REDD+.

Tahap 1 Studi Komparatif Global tentang REDD+ berlangsung dari 2009 sampai 2013. Penelitian ini menghasilkan sejumlah besar terbitan, termasuk artikel-artikel dengan tinjauan rekan sejawat, sejumlah bab buku, makalah konferensi, panduan, ringkasan kebijakan (*policy brief*), makalah kerja dan manual. Temuan-temuan utama dirangkum dalam buku *Menganalisis REDD+: Sejumlah Tantangan dan Pilihan*.

Tahap 2 Studi Komparatif Global tentang REDD+ dimulai pada 2013. Studi ini dikembangkan dari temuan-temuan tahap pertama dan meliputi empat modul penelitian: Kebijakan REDD+, Inisiatif Subnasional REDD+, Mengukur Emisi Karbon, Sinergi Mitigasi-Adaptasi, dan Tata Kelola Multitingkat, Pengelolaan Karbon dan Keputusan Pemanfaatan Lahan. Modul kelima berfokus pada berbagi pengetahuan yang merupakan komponen penting Studi Komparatif Global tentang REDD+.

CIFOR telah menyiapkan sejumlah lembar fakta (factsheets) pada modul penelitian berikut yang terdapat dalam koleksi di bawah ini.

- *Kebijakan REDD+* mengamati bagaimana REDD+ tengah berlangsung di arena kebijakan nasional.
- *Berbagai Inisiatif REDD+ Subnasional* mencermati bagaimana inisiatif REDD+ dapat dirancang dan diimplementasikan sehingga hasilnya efektif, efisien dan berkeadilan serta memberikan manfaat.
- *Mengukur Emisi Karbon* merupakan upaya untuk memungkinkan penghitungan karbon secara lebih baik sehingga pengurangan emisi dapat diukur dan diverifikasi dengan cara yang dapat diandalkan.
- *Sinergi Mitigasi – Adaptasi* mencari cara-cara untuk memanfaatkan sinergi antara REDD+ dan adaptasi perubahan iklim, untuk memastikan bahwa REDD+ berdampak lebih terhadap mitigasi dan perubahan iklim yang berkelanjutan.
- *Tata Kelola Multitingkat dan Pengelolaan Karbon* mempelajari bagaimana lembaga dari berbagai tingkatan dan sektor saling terkait dalam proses pengambilan keputusan seputar tata guna lahan, pengelolaan karbon dan mekanisme pembagian manfaat.
- *Pembagian Manfaat REDD+* bertujuan untuk memberikan sejumlah pilihan kebijakan dan panduan untuk rancangan, pengembangan dan implementasi berbagai mekanisme pembagian manfaat REDD+.

Studi Komparatif Global tentang REDD+ didanai oleh Norad, Australian Aid, European Commission, USAID, CGIAR Fund, CGIAR Research Program on Forests, Trees and Agroforestry (CRP-FTA), UKAid, Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Department of Energy & Climate Change (DECC), Ministry for Foreign Affairs of Finland, FFEM, David and Lucile Packard Foundation, US Forestry Service, PROFOR, ClimateWorks Foundation dan International Climate Initiative (IKI).

Foto oleh:

Marco Simola (sampul), Neil Palmer

Disusun sebagai bagian dari:

**PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani**

Norad

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

Fund

from the British people

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC

Department
of Energy &
Climate Change

MINISTRY FOR FOREIGN
AFFAIRS OF FINLAND

Responsible Management

ClimateWorks
FOUNDATION

Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety

Maret 2014

cifor.org | blog.cifor.org

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)

CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang membantu membentuk kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR adalah anggota Konsorsium CGIAR. Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Latin.

Pembagian Manfaat REDD+

Pembagian Manfaat REDD+ bertujuan untuk memberikan sejumlah pilihan kebijakan dan panduan untuk rancangan, pengembangan dan implementasi berbagai mekanisme pembagian manfaat REDD+.

Pembayaran REDD+ didasarkan pada pemenuhan syarat untuk mengurangi emisi karbon. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan pembayaran, mengapa, dengan prasyarat apa, berapa proporsinya dan untuk berapa lama. Sistem ini dikenal sebagai mekanisme pembagian manfaat, suatu istilah umum yang mencakup berbagai bentuk kelembagaan, struktur dan instrumen untuk menyalurkan pendanaan dan manfaat bersih lainnya dari sejumlah program REDD+.

Pembagian manfaat sangat penting untuk menciptakan insentif yang dibutuhkan untuk mengubah perilaku deforestasi dan degradasi hutan agar dapat mengurangi emisi karbon. Namun apabila para pemangku kepentingan tidak menganggap itu sebagai sistem yang adil, maka dapat mengurangi legitimasi dan dukungan bagi REDD+. Mekanisme pembagian manfaat yang dirancang dengan baik dapat mendukung keefektifan pengelolaan hutan dan meningkatkan efisiensi berbagai program REDD+.

Penelitian kami mengenai pembagian manfaat dikembangkan berdasarkan temuan-temuan Studi Komparatif Global CIFOR tentang REDD+ tahap pertama. Studi ini meneliti biaya peluang, transaksi, dan implementasi REDD+ pada tingkat nasional dan subnasional, termasuk tata kelola multi-level dan berbagai jenis hak.

Studi Komparatif Global tentang REDD+
ForestsClimateChange.org

Pembagian Manfaat REDD+ Hal-hal penting

Manfaat dapat berupa moneter atau nonmoneter

Tidak semua manfaat potensial dari REDD+ dapat dikuantifikasi dalam bentuk finansial dan tidak semua dapat diperoleh secara langsung. Manfaat langsung yang diperoleh termasuk transfer dana, misalnya transfer dana dari penjualan kredit karbon di pasar carbon atau dari donor atau dana pemerintah. Manfaat tidak langsung berkaitan dengan bagaimana implementasi REDD+ dapat memperjelas penguasaan lahan mendukung pengelolaan hutan dan tata kelola, memfasilitasi alih teknologi, dan meningkatkan jasa ekosistem seperti penyediaan air. Pada semua kasus, semua biaya peluang, transaksi dan/atau implementasi yang timbul harus diperhitungkan ketika mengidentifikasi siapa yang seharusnya mendapatkan manfaat REDD+ — hasil bersih secara keseluruhanlah yang penting. Nilai yang terikat dengan manfaat tidak langsung menunjukkan bahwa masyarakat lokal tidak serta merta membutuhkan jumlah uang yang besar supaya lebih sejahtera di bawah REDD+.¹

Pembagian manfaat yang efektif dan efisien belum tentu adil

Mungkin merupakan hal yang mustahil untuk mendapatkan sebuah sistem pembagian manfaat yang sepenuhnya efektif, efisien dan setara – kompromi timbal balik akan selalu ada.² Secara teknis, pendekatan yang paling efektif dan efisien, dalam hal pengurangan emisi, adalah dengan menyalurkan dana bagi mereka yang dapat mencapai pengurangan emisi terbesar, seperti para pemilik lahan yang luas atau pemegang konsesi – namun pendekatan ini dapat diartikan sebagai memberi imbalan kepada mereka yang telah mengambil keuntungan dari deforestasi di masa lampau (pada beberapa kasus secara tidak sah)¹ atau dapat memunculkan insentif yang tidak diinginkan bagi pihak lain untuk melakukan deforestasi; juga merugikan masyarakat yang lebih miskin dan mereka yang telah melindungi hutan, termasuk masyarakat adat.² Oleh karena itu, perlu menentukan tujuan utama REDD+ dan manfaat tambahan yang diinginkan pada masing-masing konteks. Isu-su ini umumnya belum terklarifikasi.¹

Pemikiran tentang prinsip ‘kesetaraan’ dalam pembagian manfaat bervariasi

Masing-masing negara memiliki beberapa wacana publik yang menunjukkan pandangan tentang cara menyalurkan berbagai manfaat REDD+ secara adil.¹ Wacana yang dominan di semua negara mengarah pada pandangan bahwa mereka yang mempunyai hak-hak yang sah secara hukum seharusnya mendapat manfaat dari REDD+ dan para pemangku kepentingan yang mengeluarkan biaya memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi. Namun mengutamakan mereka yang memiliki hak-hak yang sah secara hukum dapat merugikan masyarakat miskin, yang kebanyakan hak formal atas lahannya tidak jelas atau tidak pasti; selain itu, hak atas karbon biasanya belum terdefinisikan secara jelas. Kompensasi atas biaya dapat mendorong berbagai pihak untuk terlibat, namun itu merupakan insentif yang lemah dalam mencapai kinerja REDD+ yang baik apabila tidak dikaitkan dengan hasil. Pandangan lainnya adalah mereka yang melindungi hutan yang harus diberi imbalan pandangan ini mendapatkan sedikit dukungan selain di Brasil dan Peru. Wacana keempat adalah mereka yang menerapkan atau memfasilitasi proyek-proyek REDD+, seperti badan-badan pemerintah atau pengembang proyek, seharusnya menerima manfaat; tantangannya adalah untuk mencari keseimbangan agar mereka mendapatkan cukup insentif namun tidak seperti menerima durian runtuh.

Banyak negara cenderung memilih pendekatan yang sudah lazim

Mekanisme pembagian manfaat dapat secara vertikal (pembagian lintas skala dari nasional sampai lokal) atau horizontal (pembagian di dalam suatu skala), atau kombinasi keduanya.³ Pendekatan-pendekatan berbasis dana, kesepakatan konsesi hutan, tarif sewa lahan⁴ dan instrumen-instrumen berbasis pasar umumnya bersifat vertikal. Pendekatan-pendekatan yang umumnya bersifat horizontal

Agar semua pemangku kepentingan mendukung REDD+ dan mekanisme pembagian manfaat akhir, maka legitimasi proses perancangan mekanisme ini sangat penting.

Pembagian manfaat penting untuk menciptakan insentif yang dibutuhkan untuk mengubah perilaku deforestasi dan degradasi hutan dan dengan demikian mengurangi emisi karbon.

adalah pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat dan pengelolaan hutan bersama.² Sejauh ini, sejumlah negara cenderung mengembangkan model-model yang sudah ada yang paling lazim dalam konteks masing-masing negara.² Pendekatan ini dapat mengurangi biaya dan menarik dukungan politik. Namun keefektifan, efisiensi dan kesetaraan dari model-model tersebut tergantung pada akuntabilitas, transparansi dan kapasitas pengelolaan keuangan negara – yang agak lemah di sebagian besar negara yang diteliti.

Negara yang diteliti

- Brasil
- Kamerun
- Indonesia
- Peru
- Tanzania
- Vietnam

Legitimasi prosesnya penting

Pembagian manfaat memiliki berbagai tujuan dan melibatkan sejumlah kelompok kepentingan. Agar semua pemangku kepentingan mendukung REDD+ dan mekanisme pembagian manfaat akhir, legitimasi proses perancangan mekanisme ini sangat penting.¹ Khususnya adalah kesetaraan prosedural – semua pemangku kepentingan harus terlibat dalam pengambilan keputusan tentang mekanismenya.⁵ Kesetaraan ini penting dalam mencegah masuknya kepentingan suatu kelompok kecil yang memiliki pengaruh kuat dan pada akhirnya menguasai manfaat. Namun di sebagian besar negara yang diteliti, kelompok yang berkuasa mendominasi diskusi REDD+, sementara masukan dari kelompok yang rentan dan tersisih sangat terbatas.² Selain itu, di sebagian besar negara, para pelaku di balik pemicu deforestasi tidak diikutsertakan, yang akan mengurangi keefektifannya.

Kondisi politik-ekonomi di negara-negara REDD+ menimbulkan risiko

Hak penguasaan lahan yang tidak jelas dan tidak pasti menyebabkan ketidakadilan dan dapat membahayakan prinsip kesetaraan. Konflik antara lembaga-lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan atas penguasaan manfaat potensial dapat mengurangi efisiensi. Kegagalan dalam memanfaatkan pelajaran tentang kondisi yang mendukung, sebagai akibat lemahnya pertukaran informasi, dapat menyebabkan upaya-upaya yang tumpang tindih, kapasitas yang tidak memadai dan pembengkakan biaya. Kegagalan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan akan mengurangi legitimasi proses dan kemudian dapat mengurangi penerimaan atas mekanisme akhir.² Apabila terjadi korupsi, kolusi, penguasaan manfaat oleh kelompok elit, dan kurang transparansi dan akuntabilitas, maka pembayaran mungkin tidak mampu memberikan dampak.⁶ Untuk memitigasi risiko-risiko tersebut maka dibutuhkan perbaikan koordinasi, penegakan hukum, pertukaran informasi, kapasitas dan panduan aliran finansial. Apabila pembagian biaya dan manfaat REDD+ adalah sesuai dan mampu memberikan insentif yang cukup untuk mendorong perubahan, REDD+ dapat membantu mencapai perbaikan-perbaikan tersebut.²

Daftar Pustaka

- 1 Luttrell C, Loft L, Gebara MF, Kweka D, Brockhaus M, Angelsen A and Sunderlin W. 2013. Who should benefit from REDD+? Rationales and realities. *Ecology and Society* 18(4): 52.
- 2 Pham TT, Brockhaus M, Wong G, Dung LN, Tjajadi JS, Loft L, Luttrell C dan Assembe Mvondo S. 2013. *Approaches to benefit sharing: A preliminary comparative analysis of 13 REDD+ countries*. Working paper 108. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- 3 Lindhjem H, Aronsen I, Bråten KG dan Gleinsvik A. 2010. *Experiences with benefit sharing: Issues and options for REDD-plus*. Oslo: Econ Pöyry.
- 4 Assembe-Mvondo S, Brockhaus M dan Lescuyer G. 2013. Assessment of the effectiveness, efficiency and equity of benefit-sharing schemes under large-scale agriculture: Lessons from land fees in Cameroon. *European Journal of Development Research* 25:641–56.
- 5 McDermott M, Mahanty S dan Schreckenberg K. 2013. Examining equity: A multidimensional framework for assessing equity in payments for ecosystem services. *Environmental Science and Policy* 33: 416-427.
- 6 Luttrell C, Resosudarmo IAP, Muharrom E, Brockhaus M dan Seymour F. 2012. The political context of REDD+ in Indonesia: Constituencies for change. *Environmental Science & Policy* doi:10.1016/j.envsci.2012.10.001

Kredit foto

Marco Simola (sampul, bagian dalam), Achmad Ibrahim, Ollivier Girard, Neil Palmer

Disusun sebagai bagian dari:

**PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani**

Maret 2014

cifor.org | blog.cifor.org

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)

CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang membantu membentuk kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR adalah anggota Konsorsium CGIAR. Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Latin.

Kebijakan REDD+

Kebijakan REDD+ mengamati bagaimana REDD+ tengah berlangsung di arena kebijakan nasional.

Tujuan REDD+ secara keseluruhan adalah untuk membantu memitigasi perubahan iklim global, dengan menciptakan insentif bagi berbagai negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan.

Namun agar REDD+ dapat mewujudkan potensi mitigasi secara penuh, maka pemicu deforestasi dan degradasi hutan harus diatasi. Caranya termasuk melakukan reformasi di bidang kebijakan, berbagai praktik dan proses pada tingkat nasional.

Pemerintah nasional di negara-negara pelaksana REDD+ mengadaptasi atau memperkenalkan kebijakan yang relevan. Namun sejauh mana kebijakan tersebut akan efektif atau tidak ditentukan oleh berbagai faktor: perilaku aktor-aktor politik, bagaimana para aktor memahami dan merespon REDD+, bagaimana kelembagaan dibentuk, serta peraturan-peraturan dan praktik yang ada.

Dengan menganalisis pemicu, perantara, institusi dan wacana publik yang membentuk konteks REDD+ di beberapa negara, kami berupaya untuk memahami perubahan apa yang diperlukan untuk menciptakan sistem REDD+ dengan hasil yang efektif, efisien dan berkeadilan, dan bagaimana perubahan ini dapat terwujud.

Studi Komparatif Global tentang REDD+
ForestsClimateChange.org

Kebijakan REDD+ Hal-hal Penting

Deforestasi tidak hanya terkait dengan sektor kehutanan

Beberapa kebijakan di luar sektor kehutanan secara tidak langsung memicu deforestasi dan degradasi hutan. Kebijakan ini termasuk sektor pembangunan nasional, sasaran energi dan ketahanan pangan, dan dukungan yang kuat bagi industri-industri ekstraktif. Kebijakan tersebut acap kali dilandaskan pada paradigma umum dalam pembangunan nasional yang berlaku dan kerangka atau tujuan kebijakan yang ada, yang mencerminkan “cara pencapaian yang selama ini dilakukan”, sehingga segala tantangan akan menjadi kontroversial dan menemui perlawanan. Kerangka kerja yang ada dapat menyatukan peraturan dan kebijakan yang mendukung REDD+¹, namun untuk melucuti struktur kekuasaan dan perilaku mencari keuntungan yang ada akan memerlukan reformasi besar-besaran.

Status Quo lebih berkuasa dan menolak perubahan

Dalam banyak hal, kepentingan ekonomi yang kuat dan struktur kekuasaan berada di balik sejumlah pemicu utama deforestasi: mereka memperkuat *status quo* dan menciptakan penghambat untuk berubah.² Di banyak negara, pemicu utama deforestasi terkait dengan rente yang sangat tinggi.¹ Perusahaan-perusahaan komersial berskala besar, khususnya, yang memegang kekuasaan cukup besar dengan melibatkan kekayaan dan hubungan dekat dengan struktur birokrasi dan negara pun memiliki kepentingan ekonomis dan politik terhadap eksploitasi dan konversi hutan. Hal ini berarti, sejumlah aktor politik dan ekonomi yang berkuasa akan memilih untuk melanjutkan “bisnis seperti biasa”.³

Implementasi Kebijakan REDD+ menghadapi berbagai kendala

Mencapai perubahan transformasi¹ akan mencakup hal-hal berikut:

- Kurangnya koordinasi, baik vertikal maupun horizontal, di antara lembaga-lembaga pemerintah, yang memperbesar biaya transaksi dan menghambat upaya-upaya untuk melintasi batas-batas sektoral;
- terbatasnya keterlibatan kelompok-kelompok rentan, yang mengakibatkan keterwakilan yang tidak memadai, ketidaksetaraan dan kemungkinan terjadinya konflik¹;
- Korupsi dan perampasan lahan dan manfaat oleh para elit yang menyebabkan ketidakefektifan kebijakan dan mengarahkan pada ketidakadilan, inefisiensi dan kemungkinan terjadinya konflik;
- Terbatasnya otonomi negara dari kepentingan sektor swasta yang berkuasa;
- aktor-aktor internasional sebagai faktor pendorong tunggal, yang mengakibatkan kurangnya rasa kepemilikan nasional dan mempersulit perumusan dan penerapan kebijakan REDD+ nasional secara lebih efektif¹;
- Rendahnya kapasitas administratif dan teknis membatasi kemampuan negara untuk menerapkan dan menegakkan kebijakan, hukum dan keuangan atau sistem pengelolaan lainnya.

Insentif ekonomi dan informasi yang baru, dan meningkatnya kekhawatiran publik tentang perubahan iklim, serta aktor-aktor dan koalisi yang baru – semua ini berpotensi untuk memunculkan perubahan transformatif.

Negara yang diteliti

- Bolivia
- Brasil
- Kamerun
- Indonesia
- Republik Demokratik Kongo
- Papua Nugini
- Nepal
- Peru
- Tanzania
- Vietnam

Analisis parsial

- Burkina Faso
- Etiopia
- Laos
- Mozambik

Perubahan harus muncul dari dalam

Perubahan transformatif memerlukan sebuah perlawanan yang kuat terhadap “bisnis seperti biasa” – menanggulangi kepentingan penguasa dan mengakar di balik pemicu utama deforestasi dan menjauh dari model dan proses kebijakan tradisional. Menantang *status quo* dan mengatasi berbagai hambatan tersebut mengharuskan adanya aliansi yang luas dan inklusif di dalam negeri. Membangun konstituensi domestik demi terwujudnya perubahan⁴ akan membutuhkan upaya-upaya proaktif, dan tidak hanya dari masyarakat madani. Dua elemen di bawah ini akan membantu keberhasilan koalisi ke arah perubahan:

- dukungan dari kalangan elit negara dan bisnis yang berwenang di bidang pembuatan kebijakan atau dapat memengaruhi keputusan kebijakan;
- keahlian dan kapasitas teknis untuk menantang model kebijakan tradisional dan menunjukkan bagaimana menyelaraskan REDD+ dengan tujuan-tujuan pembangunan.

REDD+ adalah pengubah permainan

Insentif ekonomi dan informasi baru, pemikiran publik yang terus berkembang tentang perubahan iklim, dan aktor serta koalisi yang baru – semua ini berpotensi untuk memunculkan perubahan transformatif.² Gagasan tentang REDD+ saja telah merangsang masuknya aktor-aktor baru, termasuk berbagai bisnis yang berfokus pada karbon dan investasi “hijau”, lembaga-lembaga pemerintah dan kelompok-kelompok marjinal seperti masyarakat adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan. Para pendatang baru ini memperoleh perhatian di arena kebijakan, ketika mereka bersaing dengan aktor-aktor yang sudah ada untuk merealisasikan kepentingan mereka. Sebuah perspektif baru tentang nilai “tegakan hutan” muncul, menyatukan aktor-aktor, kepentingan serta isu-isu lama dan baru.

Daftar Pustaka

- 1 Di Gregorio M, Brockhaus M, Cronin T dan Muharrom E. 2012. Politics and power in national REDD+ policy processes. Dalam Angelsen A, Brockhaus M, Sunderlin W dan Verchot LV, eds. *Analysing REDD+: Challenges and Choices*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 69–90.
- 2 Brockhaus M dan Angelsen A. 2012. Seeing REDD+ through 4Is: A political economy framework. Dalam Angelsen A, Brockhaus M, Sunderlin W dan Verchot LV, eds. *Analysing REDD+: Challenges and Choices*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 15–30.
- 3 Brockhaus M, Di Gregorio M dan Mardiah S. 2013. Governing the design of national REDD+: An analysis of the power of agency. *Forest Policy and Economics* doi: 10.1016/j.forpol.2013.07.003
- 4 Luttrell C, Resosudarmo IAP, Muharrom E, Brockhaus M dan Seymour F. 2012. The political context of REDD+ in Indonesia: Constituencies for change. *Environmental Science & Policy* 35: 67–75 doi: 10.1016/j.envsci.2012.10.001

Bacaan lebih lanjut

- Angelsen A dan Rudel TK. 2013. Designing and implementing effective REDD+ policies: A forest transition approach. *Review of Environmental Economics and Policy* 7(11):91–113.
- Assemble-Mvondo A, Brockhaus M dan Lescuyer G. 2013. Assessment of the effectiveness, efficiency and equity of benefit-sharing schemes under large scale agriculture: Lessons from land fees in Cameroon. *European Journal of Development and Research* 25:641–56.
- Brockhaus M dan di Gregorio M. 2012. *A brief overview: Component 1 on national REDD+ policies and processes*. CIFOR Infobrief 13. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- Brockhaus M, di Gregorio M dan Wertz-Kanounnikoff S. 2012. *Guide for country profiles: Global Comparative Study on REDD (GCS-REDD) Component 1 on National REDD+ Policies and Processes*. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- Brockhaus M, Obidzinski K, Dermawan A, Laumonier Y dan Luttrell C. 2012. An overview of forest and land allocation policies in Indonesia: Is the current framework sufficient to meet the needs of REDD+? *Forest Policy and Economics* 18:30–37.
- Di Gregorio M, Brockhaus M, Cronin T, Muharrom E, Santoso L, Mardiah S dan Büdenbender M. 2013. Equity and REDD+ in the media: A comparative analysis of policy discourses. *Ecology and Society* 18(2):39.
- Di Gregorio M, Price S, Saunders C dan Brockhaus M. 2012. *Code book for the analysis of media frames in articles on REDD*. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- Korhonen-Kurki K, Brockhaus M, Duchelle A, Atmadja S, Pham TT dan Schofield L. 2013. Multiple levels and multiple challenges for measurement, reporting and verification of REDD+. *International Journal of the Commons* 7(2). <http://www.thecommonsjournal.org/index.php/ijc/article/view/372/348>
- Korhonen-Kurki K, Sehring J, Brockhaus M dan Di Gregorio M. 2014. Enabling factors for establishing REDD+ in a context of weak governance. *Climate Policy* 14(2):167–186.
- Larson AM, Brockhaus M, Sunderlin WD, Duchelle A, Babon A, Dokken T, Pham TT, Resosudarmo IAP, Selaya G, Awono A dan Huynh T. 2013. Land tenure and REDD+: The good, the bad and the ugly. *Global Environmental Change* 23(3): 678–89.
- Luttrell C, Loft, L, Gebara, MF, Kweka, D, Brockhaus, M, Angelsen, A dan Sunderlin, WD. 2013. Who should benefit from REDD+? Rationales and realities. *Ecology and Society* 18(4): 52.
- Pacheco P, Putzel P, Obidzinski K dan Schoneveld G. 2012. REDD+ and the global economy: Competing forces and policy options. Dalam Angelsen A, Brockhaus M, Sunderlin W dan Verchot LV, eds. *Analysing REDD+: Challenges and Choices*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 51–66.

Foto oleh:

Ollivier Girard (sampul, bagian dalam), Neil Palmer, Jan Van Der Ploeg

Disusun sebagai bagian dari:

**PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani**

Norad

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC

Fund

Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety

Maret 2014

cifor.org | blog.cifor.org

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)

CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang membantu membentuk kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR adalah anggota Konsorsium CGIAR. Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Latin.

Berbagai Inisiatif REDD+ Subnasional

Berbagai Inisiatif REDD+ Subnasional mencermati bagaimana inisiatif REDD+ dapat dirancang dan diimplementasikan sehingga hasilnya akan efektif, efisien dan berkeadilan serta menghasilkan manfaat tambahan.

Walaupun REDD+ masih dinegosiasikan di arena internasional, sekitar 200 inisiatif karbon hutan di tingkat subnasional sudah berjalan di seluruh dunia.¹ Berbagai intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan cadangan karbon hutan yang dibandingkan dengan skenario bisnis seperti biasa (yaitu, skenario jika intervensi tidak dilakukan).

Bagaimana kemungkinan keberhasilan berbagai intervensi tersebut? Apakah hasilnya akan efisien, berkeadilan dan efektif? Akankah mereka menghasilkan manfaat tambahan seperti peningkatan penghidupan dan perlindungan penguasaan lahan dan keanekaragaman hayati? Kondisi dan kegiatan apa sajakah yang mendukung atau menghambat inisiatif-inisiatif ini dalam mencapai tujuannya? Bagaimana mereka dapat memperoleh dukungan yang diperlukan dari masyarakat setempat?

Untuk membantu menjawab pertanyaan ini, kami mengumpulkan dan menganalisis data acuan sosial-ekonomi dan biofisik di 23 lokasi REDD+ di enam negara, yang mencakup lebih dari 170 desa dan hampir 4.500 rumah tangga. Untuk memastikan bahwa dampak yang dihasilkan sesuai dengan inisiatif-inisiatif, kami membandingkan data sebelum dan sesudah intervensi, serta data dengan atau tanpa intervensi.^{2,3}

Studi Komparatif Global tentang REDD+
ForestsClimateChange.org

Berbagai Inisiatif REDD+ Subnasional

Hal-hal Penting

Pentingnya penguasaan lahan yang terjamin dan jelas

Untuk mendapatkan hasil yang efektif, efisien dan berkeadilan, hak-hak terkait penguasaan atas hutan, pohon dan karbon pohon harus jelas.⁴ Untuk mengalokasikan insentif REDD+, siapa yang berhak mendapatkan manfaat haruslah jelas.⁵ Apabila masyarakat lokal memiliki jaminan atas hak mereka, mereka termotivasi untuk mengelola lahan secara berkelanjutan. Jika tidak, mereka mungkin enggan melakukan investasi jangka panjang; beberapa bahkan mungkin membuka lahan sebagai cara untuk menyatakan klaim mereka.⁴ Sebagian yang lain mungkin menolak REDD+ jika mereka khawatir bahwa akan lebih banyak pihak luar yang mengambil alih lahan mereka.⁶ Penguasaan lahan yang jelas juga melindungi hak dan penghidupan masyarakat serta dapat mencegah pemanfaatan sumber daya secara tergesa-gesa ketika nilai hutan meningkat.⁷

Masalah penguasaan lahan sedang naik daun

Di sebagian besar negara REDD+, penguasaan lahan bersifat ambigu dan saling dipertentangkan – dan oleh karena itu, belum terjamin. Dalam sebuah analisis di desa-desa di lima negara, lebih dari separuh responden mengatakan bahwa penguasaan lahan mereka belum terjamin.⁷ Sebuah analisis di sejumlah lokasi di Indonesia mendapatkan bahwa kondisi penguasaan lahan yang ada tidak memadai untuk mengimplementasikan REDD+ secara efektif.⁸ Bahkan di Brasil, yang penguasaan lahannya dianggap cukup memadai, ketidakpastian penguasaan lahan ternyata banyak menimpa rumah tangga.⁹

Penguasaan lahan membutuhkan perbaikan pada tingkat nasional

Para pemrakarsa inisiatif mencoba untuk menyelesaikan isu-isu penguasaan lahan, misalnya dengan menindaklanjuti penyebab konflik, menandai batas melalui pemetaan, mengembangkan rencana tata ruang pemanfaatan lahan, mengidentifikasi pemegang hak legal dan mencatatkan hak milik lahan.⁷ Namun demikian, mereka terhambat karena cakupan dan sumber masalah penguasaan lahan bersifat nasional.^{7,11} Aksi penguasaan lahan nasional memang diperlukan, namun masih terbatas.⁴ Sejumlah hambatannya antara lain adalah keterbatasan kapasitas untuk demarkasi dan pencatatan status lahan, kepentingan mereka yang bersaing untuk lahan dan sumber daya, dan penghambat-penghambat ideologis.⁴ Integrasi upaya-upaya penguasaan lahan nasional dan lokal juga dibutuhkan, termasuk klarifikasi kebijakan REDD+ di tingkat internasional dan nasional, serta pengembangan mekanisme resolusi konflik.⁷

Bagi penduduk desa, penghidupan adalah yang terpenting

Survei menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk desa di sekitar lokasi REDD+ berharap bahwa inisiatif akan meningkatkan penghasilan dan penghidupan mereka, namun mereka khawatir kebijakan ini akan merugikan atau membatasi akses mereka ke sumber daya.¹² Banyak yang menyatakan bahwa mereka lebih berminat untuk meningkatkan penghasilan dibandingkan melindungi hutan demi kebaikan hutan sendiri. Misalnya, suatu studi di Indonesia menemukan bahwa minat rumah tangga untuk melindungi hutan sangat kecil, kecuali jika tindakan ini menguntungkan penghidupan mereka.⁸ Temuan ini menunjukkan bahwa REDD+ akan menjadi efektif hanya jika dapat bersaing secara ekonomis dengan kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan gas rumah kaca. Inisiatif REDD+ harus menyeimbangkan perlindungan hutan dengan persoalan kesejahteraan penduduk desa dan melindungi mata pencaharian pertanian.¹³

Penduduk desa ingin – dan seharusnya – dilibatkan

Penduduk desa yang disurvei¹² ingin terlibat dan berpartisipasi secara berarti dalam inisiatif REDD+. Mereka juga ingin para pemrakarsa berkomunikasi dengan lebih baik, menunjukkan transparansi yang lebih luas, serta menghormati dan mendukung hak-hak mereka;¹² harapan ini mencerminkan beberapa jaring pengaman UNFCCC.¹⁴ Namun ternyata ditemukan bahwa pengetahuan penduduk desa tentang REDD+ dan/atau inisiatif REDD+ lokal umumnya rendah.¹² Kebanyakan inisiatif-inisiatif memiliki beberapa kegiatan untuk memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari penduduk desa, namun tidak semuanya berhasil dan beberapa pemrakarsa, menunda pembelajarannya.⁷ Pemrakarsa harus menginformasikan tentang REDD+ kepada penduduk desa dengan lebih baik dan melibatkan mereka dalam rancangan inisiatif dan implementasinya.

Inisiatif REDD+ harus menyeimbangkan perlindungan hutan dengan persoalan kesejahteraan masyarakat dan melindungi mata pencaharian pertanian.

Kejelasan penguasaan lahan melindungi hak-hak masyarakat dan penghidupan mereka serta dapat mencegah pemanfaatan sumber daya yang tergesa-gesa ketika nilai hutan meningkat.

Negara yang diteliti

- Brasil
- Kamerun
- Indonesia
- Peru
- Tanzania
- Vietnam

Masalah penguasaan lahan secara umum^{4,7,10}

- perambahan
- persengketaan
- persaingan tanah
- kemudahan untuk mencabut hak
- pendaftaran lahan yang kadaluarsa
- pembatasan pemerintah atas pemanfaatan lahan
- pembatasan perusahaan atas pemanfaatan lahan
- kesenjangan antara hak-hak adat yang diyakini dan hak-hak yang resmi
- tumpang tindih kepemilikan atau klaim atas lahan
- penyerobotan
- konflik
- perampasan oleh para petinggi
- kurangnya pencatatan tentang status lahan

Diskusi internasional memengaruhi tindakan lokal

Kurangnya kejelasan tentang arah REDD+ menimbulkan ketidakpastian, khususnya terkait pembayaran untuk jasa lingkungan (PES) – inti dari kebijakan REDD+ – akan terwujud. Keterlambatan dalam negosiasi internasional menghambat implementasi inisiatif. Rancangan inisiatif cenderung mengkombinasikan PES dengan pendekatan-pendekatan konservasi yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga para pemrakarsa dapat segera memulai dan memiliki pilihan yang dapat digunakan, namun model yang lama memiliki sejarah mengenai beberapa permasalahan.¹⁵ Beberapa pemrakarsa menunda upaya-upaya untuk terlibat penuh dan mendidik warga desa, untuk menghindari bertumbuhnya harapan seandainya manfaat REDD+ tidak terwujud.⁷ Lebih jauh lagi, ketika (atau jika) REDD+ telah berjalan sepenuhnya, isu-isu tambahan terkait penguasaan lahan kemungkinan akan muncul, yang saat ini hanya dapat diperkirakan oleh para pemrakarsa.⁷ Selain itu, jaring pengaman sosial harus diselesaikan pada tingkat internasional untuk memunculkan tindakan nyata.¹³

Daftar Pustaka

- 1 Kshatriya M, Sills EO dan Lin L. 2011. *Global database of REDD+ and other forest carbon projects*. Interactive map. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- 2 Sunderlin WD, Larson AM, Duchelle A, Sills EO, Luttrell C, Jagger P, Pattanayak S, Cronkleton P dan Ekaputri AD. 2010. *Technical Guidelines for Research on REDD+ Project Sites with Survey Instruments and Code Book*. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- 3 Jagger P, Sills E, Lawlor K dan Sunderlin WD. 2010. *A Guide to Learning about Livelihood Impacts of REDD+*. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- 4 Larson A, Brockhaus M dan Sunderlin WD. 2012. Tenure matters in REDD+: Lessons from the field. Dalam Angelsen A, Brockhaus M, Sunderlin WD dan Verchot L, eds. *Analysing REDD+: Challenges and Choices*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 153–75.
- 5 Luttrell C, Loft L, Gebara MF dan Kweka D. 2012. Who should benefit and why? Discourses on REDD+ benefit sharing. Dalam Angelsen A, Brockhaus M, Sunderlin WD dan Verchot L, eds. *Analysing REDD+: Challenges and Choices*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 129–52.
- 6 Larson A dan Petkova E. 2011. An introduction to forest governance, people and REDD+ in Latin America: Obstacles and opportunities. *Forests* 2(1): 86–111.
- 7 Sunderlin WD, Larson AM, Duchelle AE, Resosudarmo IAP, Huynh Thu Ba, Awono A dan Dokken T. 2013. How are REDD+ proponents addressing tenure problems? Evidence from Brazil, Cameroon, Tanzania, Indonesia, and Vietnam. *World Development* doi: 10.1016/j.worlddev.2013.01.013.
- 8 Resosudarmo IAP, Atmadja S, Ekaputri AD, Intarini DY, Indriatmoko Y dan Astri P. 2013. Does tenure security lead to REDD+ effectiveness? Reflections from five emerging sites in Indonesia. *World Development* doi: 10.1016/j.worlddev.2013.01.015.
- 9 Duchelle AE, Cromberg M, Gebara MF, Guerra R, Melo T, Larson AM, Cronkleton P, Borner J, Sills E, Wunder S, Bauch S, May P, Selaya G dan Sunderlin WD. 2013. Linking forest tenure reform, environmental compliance, and incentives: Lessons from REDD+ initiatives in the Brazilian Amazon. *World Development* doi: 10.1016/j.worlddev.2013.01.014.
- 10 Sunderlin WD, Larson AM dan Cronkleton P. 2009. Forest tenure rights and REDD+: From inertia to policy solutions. Dalam Angelsen A with Brockhaus M, Kanninen M, Sills E, Sunderlin WD and Wertz-Kanounnikoff S, eds. *Realising REDD+: National Strategy and Policy Options*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 139–49.
- 11 Sunderlin WD. 2011. The global forest tenure transition: Background, substance and prospects. Dalam Sikor T dan Stahl J, eds. *Forests and People: Property, Governance and Human Rights*. London: Earthscan. 19–32.
- 12 Resosudarmo IAP, Duchelle A, Ekaputri AD dan Sunderlin WD. 2012. Local hopes and worries about REDD+ projects. Dalam Angelsen A, Brockhaus M, Sunderlin WD dan Verchot L, eds. *Analysing REDD+: Challenges and Choices*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 193–208.
- 13 Lin L, Pattanayak SK, Sills EO dan Sunderlin WD. 2012. Pemilihan lokasi untuk proyek karbon hutan. Dalam Angelsen A, Brockhaus M, Sunderlin WD dan Verchot L, eds. *Analysing REDD+: Challenges and Choices*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 210–30.
- 14 Jagger P, Lawlor K, Brockhaus M, Gebara MF, Sonwa DJ dan Resosudarmo IAP. 2012. REDD+ safeguards in national policy discourse and pilot projects. Dalam Angelsen A, Brockhaus M, Sunderlin WD dan Verchot L, eds. *Analysing REDD+: Challenges and Choices*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 301–16.
- 15 Sunderlin WD dan Sills EO. 2012. REDD+ projects as a hybrid of old and new forest conservation approaches. Dalam Angelsen A, Brockhaus M, Sunderlin WD dan Verchot L, eds. *Analysing REDD+: Challenges and Choices*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 177–91.

Foto oleh:

Thomas Munita (sampul), Ollivier Girard, Neil Palmer, Marco Simola

Disusun sebagai bagian dari:

**PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani**

Norad

Fund

Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety

Maret 2014

cifor.org | blog.cifor.org

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)

CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang membantu membentuk kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR adalah anggota Konsorsium CGIAR. Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Latin.

Mengukur Emisi Karbon

Mengukur Emisi Karbon merupakan upaya untuk melakukan perhitungan karbon secara lebih baik sehingga pengurangan emisi akan dapat diukur dan diverifikasi dengan cara yang dapat diandalkan.

Gagasan mendasar dari REDD+ adalah untuk memberikan imbalan atas keberhasilan mengurangi jumlah emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan. Untuk menentukan apakah sebuah kegiatan REDD+ telah berhasil mengurangi emisi karbon – dan layak untuk mendapatkan imbalan atas upaya tersebut – maka mengukur besarnya pengurangan emisi jelas merupakan hal yang sangat penting.

Untuk menghitung besarnya pengurangan emisi sebagai dampak dari intervensi REDD+, kita perlu mengetahui dua hal: (1) jumlah emisi karbon setelah intervensi; dan (2) jumlah emisi karbon yang seharusnya dilepaskan jika tidak ada intervensi (dikenal sebagai “tingkat acuan” atau “acuan”. Volume pengurangan emisi dihitung sebagai emisi aktual setelah REDD+ dikurangi emisi acuan.

Karena itu “sistem MRV” yang dapat dipercaya dan akurat merupakan elemen penting REDD+ di masing-masing negara. Sistem MRV mengukur hasil kegiatan REDD+, melaporkan hasil-hasilnya kepada komunitas internasional, yang selanjutnya melakukan verifikasi laporan.

Namun demikian, pengembangan sistem MRV memiliki banyak tantangan teknis. Fokus penelitian kami adalah mengembangkan informasi, metode dan alat yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini sekaligus mengembangkan kapasitas institusi.

Studi Komparatif Global tentang REDD+
ForestsClimateChange.org

Mengukur Emisi Karbon

Hal-hal Penting

REDD+ tidak dapat berjalan sepenuhnya di sebuah negara sampai terdapat kesepakatan tentang tingkat emis acuan – yaitu jumlah emisi karbon tanpa adanya kegiatan/program pengurangan emisi.

Tugas teknis yang menantang

Karena mengukur emisi karbon merupakan inti dari REDD+, tantangan teknisnya harus diatasi sebelum REDD+ dapat berjalan sepenuhnya.¹ Tugas-tugas utamanya mencakup: mendefinisikan apa yang dimaksud dengan hutan dan apa yang menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan; melaksanakan inventarisasi cadangan karbon di hutan, mengukur seberapa besar karbon dalam suatu wilayah;² menentukan faktor-faktor emisi yang digunakan untuk mengukur perubahan cadangan karbon yang disebabkan oleh suatu kegiatan;² mengembangkan suatu persamaan alometrik biomassa, yang digunakan untuk mengkonversi pengukuran dari inventarisasi hutan menjadi estimasi biomassa dan selanjutnya menjadi angka karbon;² mengidentifikasi berbagai penyebab mendasar (atau pemicu) deforestasi saat ini dan di waktu-waktu sebelumnya dan menilai bagaimana kemungkinan perkembangannya di masa mendatang;³ memperkirakan kemungkinan besarnya deforestasi pada masa mendatang sebagai akibat dari berbagai faktor pemicu tersebut dan memperkirakan jumlah emisi karbon tanpa disertai intervensi REDD+ (“tingkat acuan”).⁴

Tingkat acuan sangat penting bagi REDD+

REDD+ tidak dapat berjalan sepenuhnya di suatu negara sampai terdapat kesepakatan tentang tingkat acuan – jumlah karbon yang akan diemisikan tanpa intervensi.⁴ Tingkat acuan pertama-tama digunakan untuk menetapkan target pengurangan emisi. Selanjutnya, ketika kegiatan sudah berjalan, tingkat acuan digunakan sebagai landasan untuk membandingkan dengan emisi yang sebenarnya. Tingkat acuan juga menjadi dasar pembayaran insentif atas pengurangan emisi karbon. Tingkat acuan dihitung menggunakan laju deforestasi dan degradasi hutan secara historis; nilai ini sangat bervariasi, sehingga sulit untuk memperkirakan laju yang akan datang secara akurat.⁴ Karena perbedaan situasi nasional, penyusunan tingkat acuan ini harus bersifat fleksibel.

Formula untuk menghitung pengurangan emisi

Pengurangan emisi

= (Data aktivitas x faktor emisi) – Emisi acuan

Besarnya lahan yang berubahPerubahan cadangan karbonEmisi tanpa REDD+

Kurangnya data yang berkualitas merupakan hambatan serius

Kita tidak dapat membuat perkiraan yang akurat dan tepat tentang emisi karbon.² Menetapkan acuan dan mengukur emisi karbon adalah tugas yang sangat sulit karena kurangnya data spesifik suatu negara atau wilayah dan kurangnya data faktor emisi untuk jenis-jenis perubahan tata guna lahan dan sumber karbon yang penting. Keterbatasan ini juga terjadi dalam hal persamaan alometrik untuk mengkonversi data pengukuran hutan menjadi angka karbon. Hal ini dapat ditingkatkan melalui investasi yang ditargetkan dan terkoordinasi, juga kemitraan antara lembaga teknis, lembaga antarpemerintah dan institusi penelitian.²

Pengembangan kapasitas dan transfer teknologi sangat penting

Sebuah studi⁵ terhadap 99 negara non-anneks 1 (berkembang) mendapati bahwa hanya 19 negara yang memiliki kapasitas yang baik untuk mengimplementasikan sistem pemantauan nasional yang lengkap dan akurat dengan menggunakan panduan yang disusun oleh Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC). Survei terhadap 17 proyek⁵ REDD+ juga mendapati bahwa secara umum kapasitas untuk mengukur emisi karbon dari berbagai sumber karbon masih rendah serta aplikasi persamaan alometrik biomasa lokal juga masih terbatas.⁶ Kurangnya kapasitas ini menghambat upaya negara-negara untuk secara penuh terlibat dalam REDD+. Agar pengembangan kapasitas berlangsung efisien, 19 negara di urutan paling atas harus diprioritaskan agar memperoleh dukungan intervensi yang tepat waktu guna meningkatkan kapasitas mereka sampai ke tingkat yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan REDD+ sepenuhnya (“tahap 3”).⁶ Investasi jangka panjang akan dibutuhkan untuk negara-negara yang kapasitasnya lebih rendah. Sebuah pendekatan bertahap (stepwise approach) yang dibangun dari kapasitas nasional yang tersedia dan secara bertahap mengisi kekurangan-kekurangan utama telah diusulkan dalam sebuah model dengan memperhatikan kapasitas institusi dan pengembangannya.⁷

Model pendekatan bertahap mendorong negara-negara untuk mulai melakukan perhitungan tingkat acuan emisi

Kami mengembangkan model pendekatan bertahap⁷ untuk menetapkan tingkat acuan dengan mempertimbangkan kondisi yang berbeda di setiap negara (lihat gambar kiri bawah). Pendekatan ini mempertimbangkan fakta bahwa negara-negara memiliki perbedaan dalam hal data yang mereka miliki untuk mengukur wilayah hutan dan perubahan cadangan karbon hutan, pengetahuan tentang pemicu deforestasi, dan kapasitas teknis mereka. Kerangka kerja ini memberikan tempat bagi negara untuk memulai, terlepas dari kualitas data atau tingkat kapasitas mereka. Pendekatan ini seharusnya dapat memfasilitasi partisipasi yang luas dan memotivasi upaya untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Pada 2011, UNFCCC mengadopsi pendekatan kami⁸ sebagai kerangka kerja penentuan acuan tingkat emisi, dan kami sekarang memperluas pendekatan ini ke seluruh sistem MRV.

MRV berbasiskan masyarakat merupakan elemen penting

Dalam MRV, keterlibatan masyarakat yang tinggal atau bergantung pada lahan tempat berlangsungnya kegiatan REDD+ merupakan hal yang penting juga. Sebagian besar metode pengukuran, pelaporan dan verifikasi karbon bersifat sangat teknis, mahal dan pada praktiknya, mungkin tidak dapat diaplikasikan sepenuhnya pada tingkat lokal;⁴ pelibatan masyarakat lokal dapat membantu mengecek kebenaran pengukuran di lapangan dan meningkatkan akurasi pengukuran. Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan REDD+ cukup penting, mengingat pemicu lokal dapat berdampak besar bagi deforestasi dan degradasi hutan.⁹ Berbagai pendekatan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pemantauan tengah dikembangkan dan diuji.⁹ Mengintegrasikan data yang diukur oleh masyarakat ke dalam sistem MRV merupakan sebuah tantangan lain, dan kami menelusuri berbagai pilihan ini di beberapa negara.

Daftar Pustaka

- 1 Angelsen A, Brockhaus B, Sunderlin WD dan Verchot LV. 2012. Introduction. *Dalam Angelsen A, Brockhaus M, Sunderlin WD dan Verchot L, eds. Analysing REDD+: Challenges and Choices*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 1–12.
- 2 Verchot LV, Anitha K, Romijn E, Herold M dan Hergoualc'h K. 2012. Emissions factors: Converting land use change to CO₂ estimates. *Dalam Angelsen A, Brockhaus M, Sunderlin WD dan Verchot L, eds. Analysing REDD+: Challenges and Choices*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 261–78.
- 3 Romijn E, Ainembabazi JH, Wijaya A, Herold M, Angelsen A, Verchot L dan Murdiyarso D. 2013. Exploring different forest definitions and their impact on developing REDD+ reference emission levels: A case study for Indonesia. *Environmental Science & Policy* 33:246–59.
- 4 Herold M, Angelsen A, Verchot LV, Wijaya A dan Ainembabazi JH. 2012. A stepwise framework for developing REDD+ reference levels. *Dalam Angelsen A, Brockhaus M, Sunderlin WD dan Verchot L, eds. Analysing REDD+: Challenges and Choices*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 279–99.
- 5 Romijn E, Herold M, Kooistra L, Murdiyarso D dan Verchot L. 2012. Assessing capacities of non-Annex I countries for national forest monitoring in the context of REDD+. *Environmental Science & Policy* 19–20:33–48.
- 6 Murdiyarso D, Brockhaus M, Sunderlin WD dan Verchot L. 2012. Some lessons learned from the first generation of REDD+ activities. *Current Opinions in Environmental Sustainability* 4:678–85.
- 7 Herold M, Verchot L, Angelsen A, Maniatis D dan Bauch S. 2012. *A step-wise framework for setting REDD+ forest reference emission levels and forest reference levels*. CIFOR InfoBrief No. 52. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- 8 [UNFCCC] United Nations Framework Convention on Climate Change. 2011. Decision 12/CP.17 on guidance on systems for providing information on how safeguards are addressed and respected and modalities relating to forest reference emission levels and forest reference levels as referred to in decision 1/ CP.16: appendix I COP 17 decisions.
- 9 Pratihast AK, Herold M, de Sy V, Murdiyarso D dan Skutsch M. 2013. Linking community-based and national REDD+ monitoring: A review of the potential. *Carbon Management* 4(1):91–104.

Foto oleh:

Ollivier Girard (sampul, bagian dalam), Nanang Sujana

Disusun sebagai bagian dari:

**PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani**

Norad

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

Fund

Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety

Maret 2014

cifor.org | blog.cifor.org

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)

CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang membantu membentuk kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR adalah anggota Konsorsium CGIAR. Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Latin.

Sinergi Mitigasi – Adaptasi

Sinergi Mitigasi – Adaptasi mencari cara-cara untuk memanfaatkan sinergi antara REDD+ dan adaptasi perubahan iklim, untuk memastikan bahwa REDD+ mempunyai dampak yang melampaui mitigasi dan berkelanjutan dalam iklim yang terus berubah.

Tujuan utama REDD+ adalah untuk membantu mitigasi perubahan iklim dengan menghindari pelepasan emisi karbon yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan. Mitigasi sangat penting untuk membatasi meluasnya perubahan iklim dan tingkat keparahan dampak buruknya bagi masyarakat.

Sekalipun dengan upaya-upaya mitigasi yang kuat, iklim akan terus berubah. Oleh karena itu, kita harus bersiap untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini – untuk menyesuaikan manusia dan sistem alam sehingga masyarakat lebih tahan dan dapat mengatasi pengaruh berbahaya dari variabilitas iklim.

Hutan berperan penting untuk mitigasi maupun adaptasi, sehingga menganalisis kaitan antara strategi-strategi ini dan mengidentifikasi peluang untuk memperkuat hasil bagi keduanya merupakan langkah yang logis. Khususnya, menggunakan REDD+ akan sangat bermanfaat untuk mendukung langkah-langkah yang akan membantu mengurangi kerentanan masyarakat hutan terhadap dampak perubahan iklim.

Untuk memandu pengembangan metode dalam rangka mencapai sinergi yang dimaksud, penelitian kami menganalisis berbagai kebijakan dan standar nasional dan internasional untuk mengamati bagaimana mereka dapat mendukung integrasi, menilai kerentanan masyarakat dan hutan, dan mengamati hasil dari pendekatan-pendekatan berbasis ekosistem terhadap adaptasi.

Studi Komparatif Global tentang REDD+
ForestsClimateChange.org

Sinergi Mitigasi-Adaptasi

Hal-hal Penting

Sebuah proyek REDD+ akan cenderung lebih berkelanjutan dan penyimpanan karbonnya akan menjadi permanen jika menggabungkan langkah-langkah adaptasi.

Hutan penting bagi mitigasi dan adaptasi

REDD+ dirancang karena konservasi hutan penting bagi hutan untuk mengurangi perubahan iklim yang disebabkan oleh kegiatan manusia: tegakan hutan dapat memindahkan karbon dari atmosfer dan dapat menyimpannya, yang sekitar 10% dari emisi karbon totalnya di dunia dihasilkan oleh deforestasi dan degradasi hutan. Pada saat yang sama, ekosistem hutan yang dikelola dengan baik dapat membantu masyarakat untuk beradaptasi dengan bahaya iklim saat ini dan perubahan iklim di masa mendatang karena besarnya jangkauan jasa-jasa ekosistem yang disediakan oleh hutan.¹ Misalnya, mangrove melindungi wilayah pesisir dari badai dan ombak, hasil hutan menyediakan masyarakat lokal suatu jaring pengaman ketika variasi iklim membahayakan pertanian, dan hutan mengatur kualitas air dan aliran sungai.^{2,3} Namun demikian, pentingnya hutan untuk adaptasi tidak tercermin dengan baik di dalam kebijakan.^{1,4}

Hutan juga perlu bantuan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim

Perubahan iklim akan membahayakan hutan, sehingga kita juga membutuhkan langkah-langkah untuk melindungi hutan dan berbagai fungsi ekosistemnya.¹ Agar hutan terus menyediakan jasa-jasa ekosistemnya yang berharga, pengelolaan hutan berkelanjutan dan/atau konservasinya sangatlah penting.

Proyek-proyek mitigasi terkait hutan, seperti halnya proyek-proyek REDD+, berpotensi untuk mendukung hutan beradaptasi dengan perubahan iklim melalui pengurangan tekanan terhadap hutan yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Caranya adalah dengan menghubungkan wilayah-wilayah berhutan dan dengan melestarikan pusat-pusat penting keanekaragaman hayati.^{1,3} Upaya-upaya untuk membantu hutan beradaptasi ("adaptasi untuk hutan") harus berlangsung sejalan dengan upaya-upaya untuk memanfaatkan hutan untuk adaptasi.²

Adaptasi dan mitigasi saling membutuhkan satu sama lain

Sebuah proyek REDD+ akan cenderung lebih berkelanjutan dan penyimpanan karbonnya menjadi permanen apabila melibatkan langkah-langkah adaptasi bagi masyarakat dan ekosistem hutan;^{2,5} apabila adaptasi tidak dipertimbangkan, dampak-dampak buruk dari perubahan iklim dapat membahayakan hasil-hasil proyek.³ Mengintegrasikan langkah-langkah adaptasi juga dapat meningkatkan penerimaan dan minat masyarakat setempat terhadap proyek, karena dengan adaptasi, penekanannya adalah pada kebutuhan mendesak masyarakat setempat (sementara mitigasi memiliki manfaat global yang lebih berjangka panjang).^{3,6} Di sisi lain, apabila sebuah proyek adaptasi melibatkan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi bagi mitigasi perubahan iklim, maka proyek seperti ini mungkin dapat memanfaatkan pendanaan karbon dan pengembangan kapasitas yang melekat pada instrumen internasional seperti REDD+.^{3,4} Selain itu, donor mungkin lebih menyukai proyek-proyek adaptasi yang juga memiliki manfaat mitigasi global.³

Perubahan iklim akan membahayakan hutan, jadi kita juga memerlukan langkah-langkah untuk melindungi hutan dan berbagai fungsi ekosistemnya.

Rancangan proyek mitigasi harus mempertimbangkan adaptasi

Proyek-proyek mitigasi di kawasan hutan dapat membantu meningkatkan penghidupan setempat dan ketahanan masyarakat terhadap dampak-dampak berbahaya perubahan iklim.³ Misalnya, sebuah proyek mitigasi yang berhasil dapat mendorong pada penyediaan jasa ekosistem lokal yang lebih besar, diversifikasi sumber-sumber pendapatan dan kegiatan ekonomi yang lebih luas, lebih banyak sarana prasarana atau jasa sosial, serta institusi lokal yang lebih kuat.⁷ Namun proyek semacam itu juga mungkin memiliki konsekuensi negatif bagi adaptasi, sehingga hal-hal tersebut harus ikut diperhitungkan.^{1,6} Contohnya, konsekuensi negatif dapat terjadi apabila, sebuah proyek REDD+ berupaya untuk membatasi hak-hak masyarakat setempat dan akses ke lahan dan sumber daya hutan, sebagai sebuah cara untuk melindungi sumber daya tersebut, atau meningkatkan ketergantungan masyarakat setempat ke pendanaan eksternal yang tidak aman.

Proyek-proyek adaptasi dapat berkontribusi bagi mitigasi iklim

Proyek-proyek adaptasi berbasiskan ekosistem bertujuan untuk mencapai pengelolaan ekosistem hutan yang lebih baik, sehingga membantu meningkatkan atau mempertahankan cadangan karbon – yang secara langsung menguntungkan upaya-upaya mitigasi perubahan iklim.^{3,4} Sinergi antara jasa-jasa ekosistem mencerminkan sinergi antara adaptasi dan mitigasi;³ misalnya, tanaman bakau yang secara bersamaan membantu melindungi wilayah pesisir dan menyimpan karbon. Namun kemungkinan terdapat kompensasi tergantung pada kebutuhan lokal;^{3,6} misalnya, sebuah proyek adaptasi mungkin lebih mengutamakan konservasi jasa air dibandingkan penyimpanan karbon.² Sebuah proyek adaptasi juga dapat berkontribusi terhadap mitigasi secara tidak langsung.³ Misalnya, apabila sebuah proyek adaptasi pertanian meningkatkan produktivitas pangan, maka tekanan pada hutan untuk perluasan kegiatan pertanian akan berkurang.

Komunikasi, penelitian dan kebijakan dibutuhkan untuk mewujudkan sinergi

Para praktisi, pembuat keputusan dan ilmuwan adaptasi dan mitigasi cenderung untuk membentuk komunitas yang terpisah.² Namun mereka yang terlibat dalam mitigasi diberikan informasi mengenai adaptasi, dan demikian pula sebaliknya, dan para peserta dari kedua kelompok harus dilatih menggunakan peralatan dan metode kelompok yang lainnya. Alat-alat, metode dan bukti tambahan dibutuhkan, baik untuk memperkuat kemungkinan manfaatnya maupun untuk mengurangi efek merugikan yang mungkin dimiliki dua pendekatan tersebut terhadap satu sama lain.³ Misalnya, menilai peran ekosistem dalam adaptasi masyarakat atau dampak proyek-proyek REDD+ pada masyarakat setempat dan kapasitas adaptif mereka akan sangat bermanfaat. Selain itu, kebijakan dan standar internasional dan nasional dapat mendukung integrasi mitigasi dan adaptasi, dengan secara aktif mendorong sinergi dan dengan menjadikan adaptasi sebagai sebuah prasyarat bagi proyek-proyek mitigasi.³

Daftar Pustaka

- 1 Locatelli B, Brockhaus M, Buck A dan Thompson I. 2010. Forests and adaptation to climate change: Challenges and opportunities. *Dalam Mery G dkk., eds. Forests and society: Responding to global drivers of change*. IUFRO World Series 25. Vienna: International Union of Forest Research Organizations. 21–42.
- 2 Locatelli B. 2011. *Synergies between adaptation and mitigation in a nutshell*. COBAM Brief. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- 3 Locatelli B, Evans V, Wardell A, Andrade A dan Vignola R. 2011. Forests and climate change in Latin America: Linking adaptation and mitigation. *Forests* 2(1):431–50.
- 4 Pramova E, Locatelli B, Brockhaus M dan Fohlmeister S. 2012a. Ecosystem services in the national adaptation programmes of action. *Climate Policy* 12(4):1–17.
- 5 Guariguata MR, Cornelius JP, Locatelli B, Forner C dan Sánchez-Azofeifa GA. 2008. Mitigation needs adaptation: Tropical forestry and climate change. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change* 13:793–808.
- 6 Pramova E, Locatelli B, Djoudi H dan Somorin O. 2012b. Forests and trees for social adaptation to climate variability and change. *WIREs Climate Change* 3:581–96.
- 7 Caplow S, Jagger P, Lawlor K. dan Sills E. 2010. Evaluating land use and livelihood impacts of early forest carbon projects: Lessons for learning about REDD+. *Environmental Science & Policy* 14:152–67.

Foto oleh:

Neil Palmer (sampul, bagian dalam), Marco Simola

Disusun sebagai bagian dari:

**PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani**

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

Fund

Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety

Maret 2014

cifor.org | blog.cifor.org

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)

CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang membantu membentuk kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR adalah anggota Konsorsium CGIAR. Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Latin.

Tata Kelola Multitingkat dan Pengelolaan Karbon

Tata Kelola Multitingkat dan Pengelolaan Karbon mempelajari bagaimana lembaga dari berbagai tingkatan dan sektor saling terkait dalam proses pengambilan keputusan seputar tata guna lahan, pengelolaan karbon dan mekanisme pembagian manfaat, sehingga berbagai rintangan ekonomi dan kebijakan untuk mengadopsi REDD+ dan opsi-opsi emisi rendah karbon lainnya dapat ditangani secara efektif dan setara.

REDD+ adalah contoh dari proses multitingkat dan mekanisme kebijakan yang mendorong pilihan tata guna lahan yang menghasilkan emisi karbon rendah.^{1,2} Para pelaku dari berbagai sektor yang terlibat secara langsung atau tidak langsung seperti pemerintah nasional dan subnasional, pebisnis, LSM, masyarakat adat, dan para petani kecil beroperasi pada berbagai tingkat administratif.^{3,4}

Dengan menganalisis beragam contoh kasus di tingkat subnasional dimana emisi karbon mengalami peningkatan atau penurunan, kami berusaha untuk:

1. Memahami bagaimana keputusan diambil oleh para aktor lintas tingkatan dan sektor terkait tata guna lahan, karbon, dan pembagian manfaat pada tingkat lanskap, termasuk bagaimana kekuasaan didistribusikan, bagaimana informasi mengalir, seberapa partisipatif proses pengambilan keputusan; apakah proses dan hasilnya sah; serta mengapa dan bagaimana perubahan timbul.
2. Mengidentifikasi beragam perspektif tentang REDD+ dan opsi-opsi tata guna lahan beremisi karbon rendah lainnya, pengaturan tata kelola multitingkat (lembaga dan kebijakan) yang relevan untuk pengambilan keputusan tentang tata guna lahan, dan sampai sejauh mana hal tersebut mendukung adopsi yang efektif dan setara dari opsi-opsi tata guna lahan yang beremisi karbon rendah.
3. Mengkaji potensi karbon yang akan dihasilkan dari berbagai tipe tata guna lahan melalui pembuatan skenario dan pemodelan karbon.

Studi Komparatif Global tentang REDD+

ForestsClimateChange.org

Tata Kelola Multitingkat dan Pengelolaan Karbon Hal-hal Penting

Metode penelitian

Tim peneliti mewawancarai para nara sumber kunci untuk mempelajari konteks nasional dan subnasional serta mengidentifikasi studi kasus dari berbagai jenis tata guna lahan yang berbeda berikut mekanisme pembagian manfaat. Kasus-kasus diseleksi untuk memperlihatkan inisiatif REDD+ dan non-REDD+ dengan emisi karbon yang menurun (atau berusaha diturunkan), dan juga lokasi-lokasi penting yang mengalami peningkatan emisi. Di setiap negara, pengelompokan kasus dilakukan di yurisdiksi politik yang berbeda (misalnya regional/provinsi dan/atau kabupaten). Pemilihan kasus diikuti dengan penerapan metode etnografis untuk menyelidiki proses pengambilan keputusan terkait tata guna lahan. Wawancara secara khusus dilakukan untuk memahami peran masing-masing pelaku dalam merancang dan mengimplementasikan mekanisme pembagian manfaat. Potensi karbon yang akan dihasilkan dari berbagai tipe tata guna lahan dikaji melalui pembuatan skenario dan pemodelan karbon.

Pertanyaan penelitian

- Bagaimana pengaturan tata kelola digunakan sebagai pertimbangan yang lebih baik dalam memutuskan opsi-opsi emisi rendah karbon, termasuk trade-off dan risikonya?
- Sah/tidak pengambilan keputusan tentang pembagian manfaat dan tata guna lahan? Faktor-faktor apakah yang memengaruhi keabsahannya?
- Pengaturan tata kelola mana yang menghasilkan pembagian manfaat yang adil dan bertanggung jawab? Pengaturan mana yang tidak demikian?

Keabsahan proses dan hasil

Keputusan dibentuk oleh beragam pengaturan tata kelola — lembaga dan proses yang menentukan siapa yang mengambil keputusan, bagaimana keputusan dibuat, dan siapa memengaruhi keputusan siapa, bagaimana dan mengapa.⁵ Berbagai pelaku yang terlibat dalam tata guna lahan dan REDD+ memiliki perspektif, kepentingan, klaim dan sasaran mereka sendiri. Mereka juga berbeda dalam hal kekuasaan, sumber daya, pengetahuan dan penafsiran mengenai aturan dan norma. Semua perbedaan ini memengaruhi cara para pelaku berinteraksi, bagaimana pengaturan kelembagaan dipraktikkan dan keabsahan menyeluruh dari pengambilan keputusan terkait tata guna lahan.^{2,3,6}

Tata kelola multitingkat: partisipasi lintas tingkatan dan sektor

Saat ini, tidak semua pelaku terkait berpartisipasi dalam proses-proses REDD+. Integrasi para pelaku utama baik secara vertikal — antar berbagai tingkatan tata kelola dan pemerintahan — maupun secara horizontal di seluruh sektor merupakan hal penting untuk menghindari kegagalan kebijakan dan pengelolaan serta menciptakan perubahan dari “bisnis seperti biasa” menjadi masa depan beremisi karbon rendah. Penduduk setempat mengandalkan para pemimpin terpilih untuk mewakili mereka, namun proyek-proyek sering kali gagal untuk bekerja dengan pemerintah setempat.⁷ Pemerintah nasional dan lokal cenderung bersaing daripada bekerja sama.⁸ REDD+ dan inisiatif konservasi serupa sering kali dikelola oleh kementerian lingkungan hidup; di lain pihak, kementerian yang mengelola pertanian atau infrastruktur terus mendukung berbagai kebijakan dan proyek yang memfasilitasi deforestasi.⁵

Yurisdiksi, *nested* (menginduk), keduanya atau tidak dua-duanya?

Yurisdiksi dan REDD+ yang menginduk — kondisi di mana yurisdiksi pemerintah mengkoordinasikan program dengan sistem Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) yang selaras, standar untuk pengaman sosial, dan kebijakan koheren untuk pembagian manfaat — secara

Contoh konseptual dari banyak yurisdiksi (berlokasi di Peru)

Integrasi para pelaku utama dari berbagai tingkatan dan sektor harus mendukung pengambilan keputusan tentang penggunaan lahan yang adil dan sah, serta opsi-opsi rendah karbon.

teoretis menguntungkan karena pengintegrasian REDD+ dengan tujuan pembangunan yang lebih luas akan menempatkan lingkup kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berikut pertanggungjawaban pada tempat yang sama yaitu pemerintah.⁴

Namun, dalam praktiknya, yurisdiksi tidak mudah untuk didefinisikan, karena masing-masing kantor dan sektor pemerintahan yang beroperasi pada berbagai tingkatan memiliki peran dan tanggung jawab eksklusif dan juga peran serta tanggung jawab bersama pada bagian-bagian lanskap yang berbeda. Terlebih lagi, apa yang ditetapkan dalam undang-undang tidak selalu sesuai dengan praktiknya. Bila keuntungan potensial dari suatu pendekatan yurisdiksi dan/atau berkelompok akan direalisasikan, pemahaman mengenai batas-batas yurisdiksi, para pelaku yang penting, dan opsi-opsi untuk menyelaraskan berbagai tindakan dalam sistem yang koheren merupakan langkah-langkah penting untuk memajukan REDD+ atau kebijakan beremisi karbon rendah lainnya secara efektif, efisien dan setara. Studi-studi legal mengenai pembagian kekuasaan dan tanggung jawab terkait tata guna lahan sedang dilakukan di beberapa negara studi untuk membantu memahami hal ini.

Apa yang seharusnya menjadi sasaran utama REDD+?

Ada banyak sudut pandang mengenai apa yang seharusnya menjadi sasaran utama REDD+. Pada tingkat global, pengurangan emisi karbon dipandang sebagai “manfaat” REDD+, sementara penghidupan, infrastruktur, jaminan tenurial, keanekaragaman hayati, dan manfaat jasa ekosistem lain yang dihasilkan inisiatif REDD+ dipandang sebagai “manfaat tambahan.” Di tingkat lokal, pandangan tersebut berubah. Bagi mayoritas pelaku lokal, karbon sebenarnya merupakan “manfaat tambahan” REDD+, sementara manfaat potensial lainnya, termasuk uang tunai, penghidupan alternatif, infrastruktur, dan hasil-hasil pembangunan lain, dipandang sebagai “manfaat” utama. Dengan mengkaji perspektif mana yang dipegang oleh aktor mana mengenai REDD+, modul ini akan memungkinkan para pembuat keputusan untuk lebih menyelaraskan rancangan dan implementasi REDD+ secara lintas tingkatan dan sektor.

Negara studi

Peru
Indonesia
Tanzania
Vietnam
Meksiko

Trade-off (pertukaran)

Trade-off di antara banyak hasil mungkin terjadi. Ini karena tidak mudah mencapai semua hasil yang diharapkan seperti penghidupan, kesetaraan dan karbon di suatu lanskap dengan beraneka ragam pelaku. *Trade-off* menjadi lebih banyak dimensinya ketika mempertimbangkan berbagai lapisan pemerintah dan tata kelola yang berbeda. Tata kelola multitingkat yang baik akan menyediakan jalur pengambilan keputusan tentang tata guna lahan pada tingkat lokal dan regional ke posisi yang lebih baik, sesuai kebutuhan global, sekaligus menggabungkan REDD+ dengan sasaran-sasaran pembangunan lainnya. Modul ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana pengaturan tata kelola multitingkat dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih demokratis seputar masalah *trade-off* ini.

Peran tata kelola multitingkat dalam pengambilan keputusan tata guna lahan dan pembagian manfaat

Daftar Pustaka

- 1 Angelsen A, Brockhaus M, Sunderlin WD dan Verchot L, ed. 2012. *Analysing REDD+: Challenges and Choices*. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- 2 Mwangi E dan Wardell A. 2012. Multi-level governance of forest resources. *International Journal of the Commons* 6(2):79–103.
- 3 Korhonen-Kurki K, Brockhaus M, Duchelle AE, Atmadja S dan Pham TT. 2012. Multiple levels and multiple challenges for REDD+. *Dalam* Angelsen A, Brockhaus M, Sunderlin WD dan Verchot L, eds. *Analysing REDD+: Challenges and Choices*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 91–110.
- 4 Larson AM dan Ribot JC. 2012. Lessons from forestry decentralization. *Dalam* Angelsen A, Brockhaus M, Sunderlin WD dan Verchot L, eds. *Analysing REDD+: Challenges and Choices*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 91–110.
- 5 Larson AM dan Petkova E. 2011. An introduction to forest governance, people and REDD+ in Latin America: Obstacles and opportunities. *Forests* 2(1):86–111.
- 6 Larson AM dan Petkova E. 2012. Decentralisation and devolution in Nicaragua's North Atlantic Autonomous Region: Natural resources and indigenous peoples' rights. *International Journal of the Commons* 6(2):179–99.
- 7 Marshall, GR. 2008. Nesting, subsidiarity, and community-based environmental governance beyond the local level. *International Journal of the Commons* 2(1).
- 8 Nagendra H dan Ostrom E. 2012. Polycentric governance of multifunctional forested landscapes. *International Journal of the Commons* 6(2):104–133.

Foto oleh:

Ollivier Girard/CIFOR (halaman sampul dan halaman dalam),
Imam Basuki/CIFOR (halaman dalam)

Diproduksi sebagai bagian dari

**RESEARCH
PROGRAM ON
Forests, Trees and
Agroforestry**

Norad

Fund

Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety

Maret 2014

cifor.org | blog.cifor.org

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)

CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang membantu membentuk kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR adalah anggota Konsorsium CGIAR. Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Latin.